

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKALIS

EMA NIRWANA^{1*}, TAUFENI TAUFIK² DAN VINCE RATNAWATI²

¹Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau

²Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Email : ema_nirwana@yahoo.co.id

Abstract: This study aims to determine 1) the significance of differences in the average financial performance of the District Government of Bengkalis first period and second period, and 2) the significance of differences in the average well-being of communities in the District Bengkalis in first period and second period. The research was conducted in the District Bengkalis, using secondary data, the analytical techniques used are independent sample t-test of variable financial performance include : a) self-sufficiency ratio, b) effectiveness of local own-source revenue ratio, c) efficiency expenditure ratio, d) the ratio of expenditure harmony of and welfare of the community include an indicator variable a) Human Development Index (HDI), b) longevity, c) mean of years schooling, d) number of literacy, and e) decent live. The result of the financial performance of the variable regions showed that : 1) self-sufficiency ratio was significant between period I and period II. 2) effectiveness of local own-source revenue ratio, efficiency expenditure ratio, the ratio harmony of state apparatus expenditure and indirect expenditure, the ratio harmony of public services expenditure and direct expenditure was not significant between period I and period II. While the result of research on welfare variable showed that Human Development Index, longevity, mean years schooling, the number of literacy, and decent live was significant between period I and period II.

Keywords : *Financial Performance, Community Welfare.*

PENDAHULUAN

Urusan pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru sejak diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Undang-undang ini merupakan revisi atas UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang secara formal dicanangkan sejak tanggal 1 Januari 2001. Mardiasmo (2004) mengingatkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Implikasi dari pemberian Otonomi Daerah ini adalah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Harapan diberikannya kewenangan ini adalah agar pemerintah daerah

lebih fleksibel dalam menciptakan strategi pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui penetapan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bahwa dengan otonomi secara tidak langsung pemerintah daerah sendirilah yang paling dekat dan paling tahu tentang kepentingan dan aspirasi masyarakat di daerah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, terlihat bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten dengan total Anggaran Belanja Daerah terbesar di Provinsi Riau selama tiga tahun terakhir, yakni Rp 2.730.248.637.883,01 pada tahun 2010, Rp 3.164.567.930.135,71 pada tahun 2011 dan Rp 3.736.615.888.422,00 pada tahun 2012. Dalam hal ini Kepala Daerah memegang peranan yang sangat penting terutama untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian utama dari tujuan otonomi dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan Pasal 156 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan daerah.

Sistem dan prosedur penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mengalami perubahan sejak diberlakukannya PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ini merupakan pengganti atas PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. Lebih lanjut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ini telah diubah melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia yang berbasis otonomi daerah, tuntutan kinerja yang baik sering ditujukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan/kemandirian keuangan daerahnya. Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah, perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Pengukuran kinerja keuangan ini memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan bermanfaat dalam hal untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai bahan perbandingan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2010

secara Nasional yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100-279 yang telah ditetapkan pada tanggal 20 April Tahun 2012. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kabupaten Bengkalis menempati peringkat ke 136 dari 346 Kabupaten se-Indonesia dengan skor 2,5903. Selain itu Kabupaten Bengkalis juga memperoleh peringkat dan status kinerja yang tergolong tinggi atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten secara nasional dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan ini merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Analisis rasio keuangan ini akan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Rendahnya kapasitas kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah akan memberikan dampak negatif seperti rendahnya *public services* atau tingkat pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pembangunan di daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut untuk melihat upaya dan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara sederhana dapat dilihat dari besaran anggaran belanja publik yang dialokasikan untuk fasilitas umum dan pelayanan kepada masyarakat terhadap total anggaran belanja daerah dari Laporan APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bengkalis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mahmudi (2007) yang menyatakan bahwa alokasi belanja harus diprioritaskan untuk perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi menduduki prioritas yang utama. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengalokasikan lebih dari 60% total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada untuk belanja pelayanan publik/belanja langsung dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010.

Lebih lanjut dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara ini didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi dalam penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa prinsip otonomi dan kewenangan seluas-luasnya diberikan kepada pemerintah daerah pada akhirnya bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan menurut Segal dan Brzuzy dalam Suud (2006) merupakan kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ini digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau lebih dikenal dengan istilah *Human Development Index (HDI)*. Berkaitan dengan IPM ini pada tahun 1990 UNDP dibawah bendera PBB memperkenalkan tiga indikator penting yaitu peluang hidup (*longevity*),

pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*). Tiga indikator ini dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Sebagai bahan pembanding, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau telah mengeluarkan publikasi terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang menyimpulkan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki status pembangunan manusia yang tergolong menengah keatas. Hal ini dibuktikan oleh Indeks Pembangunan Manusia yang berada diantara 60 hingga 80 sesuai dengan standar UNDP (2008).

Kajian empiris mengenai kinerja keuangan daerah di Indonesia selama ini telah banyak dilakukan, diantaranya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten. Hal ini menunjukkan kecenderungan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Batafor (2011), Azhar (2008), Ronald dan Sarmiyantiningsih (2010), Susantih dan Saftiana (2009), Susilo dan Hariadi (2007), Dwirandra (2008) dan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2008).

Jadi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis yang semakin transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka penulis memandang perlu untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten selama ini sehingga dapat menjadi suatu informasi yang penting terutama sebagai pembanding, untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di masa-masa yang akan datang. Selain itu diharapkan dengan adanya evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah kabupaten ini kita selaku masyarakat bisa melihat dan menilai sejauhmana pemerintah Kabupaten Bengkalis mampu dan berhasil mengelola keuangannya dengan baik sehingga akan memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian ini merupakan replikasi yang merupakan studi kasus yang mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah yakni di Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan digunakannya periode penelitian ini mengacu pada masa pemerintahan seorang Kepala Daerah selama dua periode, yaitu periode I dari tahun 2001-2005 dan kemudian terpilih kembali untuk periode 2006-2010.

Yang kedua penelitian ini mengacu pada penetapan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan yang menjadi dasar periode I dan penetapan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menjadi dasar periode ke II. Hal ini dikarenakan bahwa sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah mengalami perubahan sejak pemerintah menerapkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai pengganti Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah. Dengan diterapkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Rasio Keuangan Daerah

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002).

Rasio kemandirian keuangan

Mahmudi (2007) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Mahmudi (2007) menyatakan bahwa secara sederhana rasio kemandirian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{propinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen (Utama, 2008). Kemampuan memperoleh PAD ini dikatakan efektif apabila rasio ini mencapai 100%. Dengan kata lain rasio efektivitas PAD ini menunjukkan seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan. Mahmudi (2007) menyatakan bahwa secara sederhana rasio efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio efisiensi belanja

Menurut Mahmudi (2007) rasio efisiensi belanja menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran/belanja daerah dengan anggaran

belanja daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat dikatakan efisien ketika kegiatan tersebut dilakukan dengan baik dan seefisien mungkin. Menurut Mahsun (2006) suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal). Menurut Mahmudi (2007) menyatakan bahwa rasio efisiensi diukur dengan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Rasio keserasian belanja aparatur/belanja tidak langsung

Rasio keserasian belanja aparatur/belanja tidak langsung menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur atau belanja tidak langsung dalam satuan persen. Menurut Utama (2008) rasio keserasian belanja aparatur/belanja tidak langsung tersebut diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Aparatur/BTL} = \frac{\text{Realisasi Belanja Aparatur/BTL}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Rasio belanja pelayanan publik/ belanja langsung

Rasio keserasian belanja pelayanan publik/belanja langsung menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pelayanan publik atau belanja langsung dalam satuan persen. Menurut Utama (2008) rasio keserasian belanja aparatur/belanja tidak langsung tersebut diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Pelayanan Publik/BL} = \frac{\text{Realisasi Belanja Publik/BL}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada tahun 1990 UNDP (*United Nation Development People*) dibawah bendera PBB mengenalkan sebuah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan yakni Indeks Pembangunan Manusia atau lebih dikenal dengan istilah *Human Development Index* yang merupakan indeks gabungan pembangunan manusia yang secara ringkas mengukur rata-rata keberhasilan suatu Negara atau daerah dalam mencapai :

1. Hidup sehat dan panjang (diukur dengan harapan hidup setelah kelahiran) ;
2. Akses ke ilmu pengetahuan (diukur dengan kombinasi dua indikator yaitu tingkat melek huruf orang dewasa dan rasio mengikuti pendidikan atau lama sekolah pada pendidikan dasar, menengah dan atas) ;

3. Standar hidup yang layak (diukur dengan PDB per kapita yang dinyatakan dalam daya beli masyarakat).

Indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*)

Sebagaimana dikutip dari UNDP (*United Nation Development People*) (2008), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan dan mempertinggi kemampuan manusia (*a process of enlarging people's choices*). Proses yang memperhatikan penciptaan lingkungan yang mendukung dimana manusia dapat mengembangkan potensi dan berperan produktif secara penuh serta hidup kreatif berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan. Konsep luas dengan banyak dimensi merupakan cara memperluas pilihan manusia.

Angka harapan hidup (*Longevity*)

Menurut UNDP (2008) angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Besarnya nilai maksimum dan minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh 175 negara di dunia. Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Angka inilah yang diambil dari standar global UNDP.

Rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*)

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan (UNDP, 2008).

Angka melek huruf

Angka Melek Huruf adalah persentasi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya yang dihitung berdasarkan data Suseda (Survey Sosial Ekonomi Daerah). Untuk perhitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa Negara. Batas maksimum untuk Angka Melek Huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya adalah 0. Hal ini menggambarkan kondisi 100% atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis dan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum 0 tahun. Batas maksimum mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas (UNDP, 2008).

Standar hidup layak (*Decent Live*)

Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) atau yang lebih dikenal dengan istilah konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian yang meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia telah banyak dilakukan. Diantaranya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten. Hal ini menunjukkan kecenderungan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas kinerja keuangan instansi pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemilihan rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada beberapa model penelitian terdahulu. Beberapa penelitian tersebut diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Batafor (2011), Azhar (2008), Andrias dan Sarmiyantiningsih (2010), Susantih dan Saftiana (2009), Susilo dan Hariadi (2007), Dwirandra (2008), dan Hamzah (2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Seluruh data hasil perhitungan akan dianalisis dengan menggunakan uji beda dua rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara periode I dan periode II untuk masing-masing variabel penelitian. Objek penelitian ini dibatasi pada wilayah Kabupaten Bengkalis yang secara administratif masuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Riau. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji beda *Independent Sample T Test* (pengujian dua sampel yang tidak berhubungan). Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang bersifat runtun waktu/*time series* selama sepuluh tahun dari tahun 2001 sampai dengan tahun anggaran 2010. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi terhadap dokumen Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Sementara itu data

indikator kesejahteraan masyarakat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama (H_1)

Hasil pengujian terhadap rasio kemandirian keuangan menyimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima karena nilai P value diperoleh sebesar 0,020 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata rasio kemandirian keuangan Periode I dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan Periode II di Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan perbedaan rata-rata (*mean difference*) yang diperoleh sebesar -4,936. Disisi lain hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berupaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan dari Periode I ke Periode II dengan rasio kemandirian keuangan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2008) dan penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Hariadi (2007). Sementara itu hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Batafor (2011).

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua (H_2)

Hasil pengujian hipotesis terhadap rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak karena nilai P value diperoleh sebesar 0,144 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Periode I dengan rata-rata rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Periode II pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selain itu berdasarkan hasil penelitian ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan konsep *value for money* yakni efektivitas anggaran. Efektivitas dimaksud memberikan arti bahwa penggunaan anggaran publik telah mencapai target-target yang telah ditetapkan seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran bersangkutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Batafor (2011) dan penelitian yang dilakukan oleh Susantih dan Saftiana (2009).

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (H_3)

Hasil pengujian hipotesis terhadap rasio efisiensi belanja menyimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) ditolak karena nilai P value diperoleh sebesar 0,121 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata rasio efisiensi belanja Periode I dengan rata-rata rasio efisiensi belanja Periode II pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selain itu berdasarkan hasil penelitian ini memberikan arti bahwa belanja Pemerintah Kabupaten Bengkalis cenderung efisien dengan asumsi bahwa pencapaian prestasi atas pelaksanaan suatu kegiatan/program pemerintah telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal (Mahsun, 2006). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Batafor (2011) dan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2008).

Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat (H_4)

Hasil pengujian hipotesis terhadap rasio keserasian Belanja Aparatur/Tidak Langsung menyimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) ditolak karena nilai uji statistik t hitung yang diperoleh sebesar 0,857 dimana angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,306. Berdasarkan hal tersebut maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata rasio keserasian Belanja Aparatur Periode I dengan rata-rata rasio keserasian Belanja Tidak Langsung Periode II pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selain itu perolehan nilai t hitung positif sebesar 0,857 mengartikan bahwa rata-rata rasio keserasian Belanja Aparatur Periode I lebih tinggi daripada rata-rata rasio keserasian Belanja Tidak Langsung Periode II. Hal ini perlu mendapatkan apresiasi dari masyarakat Kabupaten Bengkalis karena secara tidak langsung Pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih memprioritaskan dana APBD untuk belanja pelayanan publik/belanja langsung. Selain itu dapat dikatakan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berhasil melakukan efisiensi pada belanja aparatur/belanja tidak langsung sehingga lebih diprioritaskan untuk fasilitas umum dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Batafor (2011) dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susantih dan Saftiana (2009).

Hasil pengujian terhadap hipotesis kelima (H_5)

Hasil pengujian hipotesis terhadap rasio keserasian Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung menyimpulkan bahwa hipotesis kelima (H_5) juga ditolak karena nilai uji statistik t hitung yang diperoleh sebesar 1,492 dimana angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,306. Berdasarkan hal tersebut diatas maka hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa

tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata rasio keserasian Belanja Pelayanan Publik Periode I dengan rata-rata rasio keserasian Belanja Langsung Periode II pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Selain itu perolehan nilai t hitung positif sebesar 1,492 mengartikan bahwa rata-rata rasio keserasian Belanja Pelayanan Publik Periode I lebih tinggi daripada rata-rata rasio keserasian Belanja Langsung Periode II. Walaupun demikian hal ini perlu mendapatkan apresiasi dari masyarakat Kabupaten Bengkulu karena secara tidak langsung Pemerintah Kabupaten Bengkulu lebih memprioritaskan dana APBD untuk belanja pelayanan publik/belanja langsung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Batafor (2011) dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susantih dan Saftiana (2009).

Hasil Pengujian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pengujian terhadap hipotesis keenam (H_6)

Hasil pengujian hipotesis terhadap variabel tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_6) diterima karena perolehan nilai P value diperoleh sebesar 0,008 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut diatas maka hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Periode I dengan rata-rata tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Periode II di Kabupaten Bengkulu dengan perbedaan rata-rata (*mean difference*) yang diperoleh sebesar -3,8400. Secara nasional menurut Laporan Pembangunan Manusia 2013 yang dirilis oleh *United Development Program* (UNDP) IPM Indonesia antara tahun 1980 dan 2012, nilai IPM Indonesia meningkat dari 4,22 menjadi 6,29 atau peningkatan sebesar 49 persen dengan peningkatan rata-rata 1,3 per tahun. Hal ini memberikan indikasi bahwa kebijakan Pemerintah terkait pembangunan manusia telah memberikan dampak yang positif bagi proses pembangunan nasional.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H_7)

Hasil pengujian hipotesis terhadap indikator Angka Harapan Hidup menyimpulkan bahwa hipotesis ketujuh (H_7) diterima karena nilai P value diperoleh sebesar 0,001 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut diatas maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata Angka Harapan Hidup pada Periode I dengan rata-rata Angka Harapan Hidup Periode II di Kabupaten Bengkulu dengan perbedaan rata-rata (*mean difference*) yang diperoleh sebesar -0,940. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Bengkulu bertambah pada Periode II dengan perolehan rata-rata Angka Harapan Hidup pada Periode I sebesar 69,2 tahun dan 70,1 tahun pada Periode II. Hal ini

memberikan arti bahwa pencapaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bengkalis ini tidak terlepas dari berbagai aspek pendukung seperti ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat, faktor lingkungan yang bersih serta kebiasaan hidup bersih masyarakat dan lain-lain. Dengan meningkatnya derajat kesehatan ini dapat meningkatkan produktivitas penduduk sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Secara nasional menurut *CIA World Factbook Tahun 2011*, Indonesia menempati urutan ke-108 dari 191 negara dengan perolehan Angka Harapan Hidup sebesar 70,76 tahun berdasarkan urutan daftar PBB.

Hasil pengujian hipotesis kedelapan (H_8)

Hasil pengujian hipotesis terhadap indikator Rata-rata Lama Sekolah menyimpulkan bahwa hipotesis kedelapan (H_8) diterima karena perolehan nilai P value sebesar 0,039 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut diatas maka hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan signifikan Rata-rata Lama Sekolah pada Periode I dengan Rata-rata Lama Sekolah pada Periode II di Kabupaten Bengkalis dengan perbedaan rata-rata (*mean difference*) yang diperoleh sebesar -7,400. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bengkalis telah mendekati dari Program wajar pendidikan dasar 9 tahun dimana masyarakat Kabupaten Bengkalis minimal dapat menamatkan pendidikan sampai tingkat SLTP. Hal ini dapat dilihat dari angka Rata-rata Lama Sekolah 8,1 tahun pada Periode I dan 8,8 tahun pada Periode II yang berarti bahwa masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat menamatkan pendidikan rata-rata pada tingkat SLTP kelas 2 atau hampir mendekati kelas 3 SLTP. Secara nasional menurut Laporan Pembangunan Manusia 2013 yang dirilis oleh United Nation Development Program (UNDP), Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia adalah 5,8 tahun, lebih rendah dari rata-rata kawasan yang sebesar 7,2 tahun. Dan hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bengkalis pada Periode I dan Priode II berada diatas angka Rata-rata Lama Sekolah secara nasional.

Hasil pengujian hipotesis kesembilan (H_9)

Hasil pengujian hipotesis terhadap indikator Angka Melek Huruf menyimpulkan bahwa hipotesis kesembilan (H_9) diterima karena perolehan nilai P value sebesar 0,022 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut diatas maka hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata Angka Melek Huruf pada Periode I dengan rata-rata Angka Melek Huruf Periode II di Kabupaten Bengkalis dengan perbedaan rata-rata (*mean difference*) yang diperoleh sebesar -1,640. Selain itu perolehan nilai t hitung negatif sebesar -3,307 mengartikan bahwa Angka Melek Huruf Periode I lebih rendah daripada Angka Melek Huruf Periode II. Hasil

penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Bengkalis sudah dapat menikmati pendidikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari angka Angka Melek Huruf yang mencapai 96,02 % pada Periode I dan 97,66% pada Periode II. Disisi lain dengan hasil tersebut masih terdapat 3,98% , masyarakat Kabupaten Bengkalis yang tidak dapat membaca dan menulis pada Periode I dan 2,34% masyarakat Kabupaten Bengkalis yang tidak dapat membaca dan menulis pada Periode II. Secara nasional *United Nation Development Program* (UNDP) dalam laporannya bulan Maret 2013 mengatakan bahwa Angka Buta Aksara di Indonesia untuk penduduk 15 tahun telah berhasil diturunkan dari 5,3% pada 2009 menjadi 4,43% pada 2011.

Hasil pengujian hipotesis kesepuluh (H_{10})

Hasil pengujian hipotesis terhadap Standar Hidup Layak dengan menggunakan Produk Dimestik Bruto (PDB) per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) menyimpulkan bahwa hipotesis kesepuluh (H_{10}) diterima karena perolehan nilai P value sebesar 0,011 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Lebih lanjut hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada Periode I, konsumsi riil perkapita masyarakat Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 598.320,- dan pada Periode II, konsumsi riil perkapita masyarakat Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 629.300,-. Konsumsi riil perkapita ini tentunya menggambarkan tingkat daya beli/pengeluaran masyarakat. Menurut data BPS, dalam terbitannya Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Edisi Februari 2012 dijelaskan bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten/kota dengan produk domestik regional bruto per kapita tertinggi di Provinsi Riau Tahun 2010 setelah Kota Bontang di Kalimantan Timur, Kabupaten Timika di Papua, DKI Jakarta di Jakarta pusat dan Kota Kediri di Jawa Timur. Selain itu menurut Riset Warta Ekonomi Agustus 2012, Kabupaten Bengkalis menempati urutan ke delapan Kabupaten/Kota terkaya di Indonesia dengan indeks 3,900. Hasil riset ini adalah PDRB per kapita tertinggi dipegang oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kabupaten Siak, Kabupaten Bogor, Kota Medan, Kabupaten Kutai timur, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Muara Enim.

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja keuangan

- a. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis antara Periode I dan Periode II.

- b. Tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis antara Periode I dan Periode II.
- c. Tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Bengkalis antara Periode I dan Periode II.
- d. Tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata rasio keserasian Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkalis antara Periode I dan Periode II.
- e. Tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata rasio keserasian Belanja Pelayanan Publik/Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkalis antara Periode I dan Periode II.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

- a. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis antara Periode I dan Periode II.
- b. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata Angka Harapan Hidup Kabupaten Bengkalis antara Periode I dan Periode II.
- c. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bengkalis antara Periode I dan Periode II.
- d. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata Angka Melek Huruf Kabupaten Bengkalis antara Periode I dan Periode II.
- e. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata Standar Hidup Layak Kabupaten Bengkalis antara Periode I dan Periode II.

Keterbatasan

- 2. Rasio kinerja keuangan pemerintah dan sangatlah banyak, sehingga rasio kinerja keuangan pemerintah yang dibahas dalam penelitian ini dirasakan kurang lengkap.
- 3. Objek penelitian ini hanya dibatasi pada salah satu kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota se-Propinsi Riau, yakni penelitian pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis saja.
- 4. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang digunakan dalam penelitian ini yakni dari tahun 2001-2010, tidak semuanya merupakan Laporan *Audited* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, mengingat sulitnya mengumpulkan laporan dimaksud dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan menjaga komitmen untuk terus berusaha untuk menggali potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli daerah sehingga mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Target peningkatan Pendapatan Asli daerah ini diharapkan akan memicu terbentuknya kebijakan proproduktif terhadap iklim usaha dan investasi sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis hendaknya tidak selalu mengandalkan sumber-sumber pendapatan Non PAD sehingga mengurangi ketergantungan kepada pihak luar. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk menciptakan sumber-sumber Pendapatan Asli daerah baru dimasa yang akan datang.
3. Proporsi pengalokasian Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan agar jumlahnya signifikan dengan pos-pos belanja daerah lainnya agar tercipta pelayanan publik yang maksimal sehingga ditargetkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terbesar di Provinsi Riau dan termasuk 10 besar kabupaten terkaya di Indonesia.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat disarankan untuk melakukan penelitian untuk keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Batafor, Gregorius Gehi. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata-Provinsi NTT*. Tesis Pascasarjana Universitas Udayana.
- Dwirandra, AANB. 2008. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002-2006*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana. (tidak dipublikasikan).
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

- Hamzah, Ardi. 2007. *Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan : Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur)*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ronald, Andreas dan Sarmiyantiningsih, Dwi. 2010. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* No. 1 Vol. 1, Juni
- Susantih, Heny dan Saftiana. 2008. *Perbandingan Indikator Efisiensi dan Efektivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*. Tesis Pascasarjana Universitas Sriwijaya. (tidak dipublikasikan)
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Hariadi, Priyo. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Tesis Pascasarjana UPNV Jatim-Surabaya. (tidak dipublikasikan)
- Suyana, Utama. 2007. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2006* . Studi Kasus Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (tidak dipublikasikan).